



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN PRODUK HUKUM DAN TATA KELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jl. Raya Tisay, Kel. Bintuni Timur, Distrik Bintuni
Kabupaten Teluk Bintuni













**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI	No SOP	01/SOP-HK/2023
	Tanggal Pembuatan	15 November 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Desember 2023
	Disahkan Oleh	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Sekretaris, Syahid Bin Muzaat NIP : 198411242010121005
	Nama SOP	Pembuatan Produk Hukum Dan Tata Kelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
		1. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan produk hukum 3. Memiliki kemampuan dalam bidang tata naskah produk hukum
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum		1. Disposisi/Draft Produk Hukum 2. Peraturan Perundang-undangan terkait; 3. Komputer; 4. Printer dan scanner; 5. Alat Tulis.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN		PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak adanya keseragaman system administrasi Tata Naskah produk hukum.		Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.

FLOWCHART PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PROSES UNGGAH KE WEBSITE JDIIH KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI

No	Kegiatan	Mutu Baku								Kelengkapan	OutPut/Keterangan	
		Ketua KPU Kabupaten	Anggota KPU Pengampu Divisi	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Sekretaris KPU	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Operator JDIIH				
1	Mengkoordinasikan atas fasilitasi Pembuatan SK/BA/PKS (pleno)	●	●	●	●						Notulensi	- Penyusunan BA dilakukan setelah rapat pleno - Penyusunan SK setelah BA ditandatangani - Penyusunan PKS setelah dilaksanakan rapat pleno dan koordinasi Bersama Lembaga kerja sama
2	Menyiapkan Draft SK/BA/PKS.			●	●	●					Disposisi	Dalam penyiapan draft SK/BA/PKS pada Tingkat Sub Bagian, dapat melibatkan Sub Bagian Lainnya.
3	Menyiapkan dan menyampaikan Draft SK/BA/PKS untuk dilakukan harmonisasi.				●	●					Nota Dinas	Draft SK/BA/PKS
4	Melaksanakan harmonisasi berdasarkan arahan-arahan serta menyampaikan hasil berupa rancangan SK/BA/PKS.					●	●	●			Disposisi	Draft SK/BA/PKS yang telah di harmonisasi dan di paraf oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
5	Melakukan koreksi rancangan SK/BA/PKS, apabila setuju diparaf dan diteruskan, dan apabila tidak setuju dikembalikan ke staf untuk diperbaiki.					●	●				Disposisi	Draft SK/BA/PKS yang telah di harmonisasi
6	Melakukan koreksi terhadap rancangan SK/BA/PKS apabila setuju menandatangani yang telah diparaf koordinasi oleh anggota, apabila tidak setuju mengembalikan untuk diperbaiki.		●	●							Draft Rancangan SK/BA/PKS	Draft Final SK/BA/PKS dan telah siap ditandatangani oleh Ketua/Anggota

7	Penandatanganan SK/BA/PKS yang telah dikoreksi								Naskah Asli SK/BA/PKS	Untuk SK dan PKS hanya ditandatangani oleh Ketua, sedangkan BA ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU yang hadir dalam rapat pleno
8	Menyampaikan Nota Dinas penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten pada laman JDIIH berupa salinan (hardcopy)								Nota Dinas	Salinan Produk Hukum SK/BA/PKS
9	Nota Dinas penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten pada laman JDIIH berupa salinan (hardcopy)								Nota Dinas	Salinan Produk Hukum SK/BA/PKS yang telah siap untuk dilakukan proses pindai
10	Cek salinan produk hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum ke website JDIIH								Form persetujuan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Persetujuan penerbitan Salinan Produk Hukum SK/BA/PKS
11	Melakukan scan Produk Hukum								Form persetujuan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Soft Copy Salinan Produk Hukum SK/PKS
12	Menggunggah Produk Hukum ke website JDIIH								Form persetujuan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Penyajian Salinan Produk Hukum SK/PKS di laman JDIIH KPU Kabupaten Teluk Bintuni

Keterangan Singkatan :

SK : Surat Keputusan

BA : Berita Acara

PKS : Perjanjian Kerja Sama

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Teluk Bintuni, 15 November 2023
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni
Ketua,

Muhammad Makmur Memed Alfajri